

REGISTER RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Nama	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
Tujuan	: 1. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan PUHA dalam Pembangunan 2. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Pemerintahan Desa 3. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi
Sasaran Strategis	: 1. Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan 2. Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak 4. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat 5. Meningkatnya Kapasitas lembaga kemasyarakatan yang aktif 6. Meningkatnya kemandirian pengelolaan Pemerintahan Desa 7. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per Perempuan usia reproduksi
IKU	: 1. Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan 2. Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Persentase Jumlah Kab/Kota Layak Anak 4. Persentase BumDesa yang terbentuk 5. Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif 6. Persentase Peningkatan Kelompok masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan SDA dan TTG 7. Persentase Desa cepat berkembang 8. Total Fertility Rate (TFR)

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Pernyataan Resiko	Penyebab Resiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang ada	Status Resiko				Rencana Pengendalian	Pemilik Resiko/ Penanggung Jawab
								K	D	Skor	Kategori/ Peringkat Resiko		
1	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Presentase keikutsertaan Anak kab/kota terbatas dalam kegiatan Forum Anak	Keterbatasan Anak yang mengikuti FA karena SDM dalam memberikan pembinaan dalam FA	C	Belum terpenuhinya hak partisipasi anak	Optimalisasi Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan Forum Anak Follow Up terus menerus (Monitoring Kab/Kota)	3	3	9	Rendah	Koordinasi dengan Dinas PP dan PA kab/kota agar memfasilitasi penguatan Forum Anak di Kab/Kota	Kabid PA
		Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Tidak Proporsional nya Jumlah kecamatan yang mendapatkan kesempatan Bimtek GNAKSA	Kekerasan terhadap anak tidak terdeteksi secara akurat	C	OPD Kab /Kota belum memprioritas keg tersebut	Memperkuat Kecamatan yang telah mengikuti Bintek GNAKSA sebagai Pilot Proyek Mendorong tiap Kab/kota mensinkronisasi keg dengan Dinas P3AP2 Provinsi Koordinasi Dinas PP dan PA Kab/Kota terkait prioritas keg yang dimaksud	3	3	9	Rendah	Dinas PP dan PA Kab/Kota mendorong tiap Kecamatan mempercepat sosialisasi GNAKSA Mendorong Dinas PP dan PA untuk memprogramkan kegiatan Bimtek serupa untuk percepatan GNAKSA	Kabid PA
		Bimtek Keg Bagi SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban Anak terhadap Anak	Jumlah SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban Anak Prov Jambi terbatas	Belum terlayannya secara optimal dari sisi kuantitas dan kualitas terhadap korban kekerasan anak (Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran)	C	SDM yang ditugaskan OPD Kab/Kota tidak sesuai kriteria dan kualifikasi	Optimalisasi Jumlah SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban Anak Provinsi Jambi Koordinasi Dinas PP dan PA kab/kota terkait standar kualifikasi Peserta (SDM) OPD Kab /Kota belum memprioritas keg tersebut	3	3	9	Rendah	Ketersediaan Anggaran yang memadai untuk peningkatan SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban Anak Meminta OPD Kab/Kota menginventarisir calon - calon peserta Bimtek yang memenuhi kualifikasi OPD Kab/Kota diminta melakukan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan serupa dengan kegiatan Dinas P3AP2	Kabid PA

Pembinaan dan Pengembangan Kota Layak Anak	Komitmen Pemerintah tiap Kab/Kota dalam mewujudkan Kab/Kota Layak Anak belum seutuhnya	Kurangnya Kesadaran Pemerintah Kab/Kota terhadap pentingnya Kota Layak Anak	C	Belum semua Kab/Kota menjadi Kota layak	Koordinasi, Pembinaan, Monitoring Evaluasi terhadap Rencana Aksi Daerah masing-masing Kab/Kota dalam rangka mewujudkan KLA	3	3	9	Rendah	Peningkatan Intensitas Pembinaan pada seluruh Kab/Kota	Kabid PA
Bimtek Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Lingkungan	Kemampuan Implementasi tentang Pola Asuh Anak yang baik dalam keluarga dan Lingkungan belum dapat terpenuhi dalam waktu singkat	Pola Asuh Anak yang baik belum terimplemantasi kepada masyarakat dikarenakan faktor sosial budaya	C	Peserta Bimtek Pola Asuh Anak dalam keluarga dan Lingkungan belum seutuhnya dapat mengimplementasikan Pola Asuh yang baik	Monitoring Kab/Kota terkait implementasi Pola Asuh Anak yang setiap tingkatan pemerintahan (RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan Kab/Kota) Mendorong Pemerintah Kab/Kota agar memberikan penguatan kepada Peserta Bimtek Pola Asuh Anak menjadi Agen Perubahan dalam Pola Asuh Anak yang baik tiap Kab/Kota masing-masing	3	3	9	Rendah	Meminta Peran serta Dinas PP dan PA Kab/Kota untuk mensosialisasikan pola asuh anak yang baik	Kabid PA
Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)	Tidak semua klien/korban kekerasan Perempuan dan Anak dapat terlayani	Kurangnya SDM ASN yang dapat melayani secara optimal	C	Terhambatnya pelayanan terhadap kasus kekerasan Perempuan dan Anak	Memanfaatkan SDM dari tenaga honorer	3	4	12	Sedang	Membuat surat usulan kepada Kepala Daerah terkait permintaan SDM yang memiliki spesifikasi sesuai dengan kebutuhan (untuk kegiatan pelayanan dan pendampingan korban	Kabid PP
					Melakukan kerjasama dengan Lembaga Masyarakat yang peduli terhadap Perempuan dan Anak untuk memfasilitasi dan mendampingi klien/korban					Mengefektifkan forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) yang diinisiasi oleh KPPA RI	
					Membuat data terpilah kasus kekerasan Perempuan dan Anak, sehingga dapat mengetahui status penyelesaian terhadap permasalahan Perempuan dan Anak					Meningkatkan kapasitas Dinas PPPA Kabupaten/Kota untuk SDM pendampingan	
	Belum memadai fasilitas dan sarana prasarana ruangan dan bangunan	Belum tersedianya ruangan khusus konseling, mediasi dan ruangan disabilitas	C		Menggunakan sementara sarana prasarana dan ruangan terbatas yang ada	5	4	20	tinggi	Memanfaatkan sarana/prasarana terbatas	
Evaluasi pelaksanaan PUG	Masih ada OPD yang belum menyusun penganggaran yang Responsif Gender	OPD belum memahami cara menyusun penganggaran yang responsif gender	C	Penganggaran yang disusun OPD tidak memperhatikan responsif gender	Melakukan pelatihan kepada OPD terkait cara penyusunan penganggaran yang responsif gender	4	4	16	tinggi	Membentuk Tim Vocal Point PUG di OPD	Kabid PP
		SDM ASN yang dikirim OPD pada saat pelatihan, bukan SDM yang membidangi	C		Telah disampaikan pada forum RPKD Provinsi Jambi					Penegasan kembali kepada Kasubbag Program masing-masing OPD	

		Sosialisasi Pendidikan Politik perempuan	Peserta yang hadir tidak sesuai spesifikasi (caleg perempuan yang ada di Parpol)	Kurangnya Pemahaman Pengurus Parpol terhadap maksud surat undangan (harusnya ditujukan untuk caleg perempuan)	C	Tidak terpenuhinya kuota 30% Caleg Perempuan di Parlemen	Telah dianggarkan pendidikan politik perempuan lingkup Provinsi Jambi	2	1	2	sangat rendah	Anggaran untuk penguatan anggota Legislatif perempuan di Kabupaten/Kota	Kabid PP
		Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Tidak maksimalnya pelayanan yang dapat diberikan pada klien/korban di rumah aman/rumah perlindungan (fasilitas yang minim dan tidak tersedianya tenaga kemanan)	Anggaran yang tidak memadai	C	Terhambatnya pelayanan di Rumah Aman	Telah mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan	4	4	16	tinggi	Perlunya penambahan fasilitas dan sarana prasarana rumah perlindungan	Kabid PP
		Pembinaan Organisasi Perempuan	Kurangaktifnya organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW dan DW	Kurangnya koordinasi antara Pengurus BKOW dan DW terhadap anggota	C	terhambatnya program dan kegiatan organisasi perempuan	Mengadakan rapat rutin dan jadwal kegiatan	3	3	9	Rendah	Penguatan kapasitas dan revitalisasi perwakilan organisasi perempuan	Kabid PP
		Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Modul ajar yang tidak update dengan regulasi terbaru	Tidak tersedianya modul ajar dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan	C	SDM yang telah terlatih tidak optimal dalam melayani dan mendampingi korban	Mencari dan membuat modul sendiri berdasarkan penyelesaian kasus yang sudah ditangani	3	4	12	Sedang	Adanya kerjasama dengan organisasi perempuan dan lembaga masyarakat untuk update modul	Kabid PP
			Peserta yang mengikuti pelatihan kebanyak Perempuan	Kurangnya pemahaman pimpinan OPD bahwa TOT SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT tidak hanya diperuntukkan untuk Peserta Perempuan	C	Minimnya pengetahuan SDM laki-laki tentang prosedur awal pelayanan dan pendampingan korban	Pada Surat Undangan sudah dijelaskan kriteria peserta yang dapat mengikuti TOT (baik perempuan ataupun laki-laki) dan sudah dibuat buku panduan TOT yang dikirimkan kepada OPD Kabupaten/Kota	4	4	16	tinggi	Perlunya ketegasan Pimpinan dalam menugaskan peserta TOT SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Kabid PP
		Pembinaan dan Penilaian P2WKSS (Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan)	Tidak adanya juknis tetap sebagai acuan pembinaan dan penilaian	Ketidajelasan posisi program P2WKSS di Pusat dikarenakan perubahan nomenklatur dan organisasi	C	Terlambatnya penilaian P2WKSS di Kabupaten/Kota	Menyusun dan menghimpun juknis mandiri disesuaikan dengan situasi daerah	2	3	6	Rendah	Perlu adanya SOP jadwal kegiatan P2WKSS untuk Kabupaten/Kota	Kabid PP
3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Perlombaan Desa dan Kelurahan	Data / Profil yang diberikan Kab/Kota belum lengkap /Tidak di Input	Kurangnya SDM	C	SDM yang sudah dilatih, pindah tugas	Melatih SDM yang baru	0	2	4	Rendah	Perlu di adakannya BinteK Profil Desa dan Kelurahan baki 11 Kabupaten /Kota se Provinsi Jambi	Bidang Pemdes
			Data Evaluasi Perkembangan Desa tidak lengkap	Tidak mempelajari PERMENDAGRI 81	C	PERMENDAGRI 81 tidak dijadikan pedoman untuk melengkapi data yang dibutuhkan	Memberitahukan ke Kab / Kota untuk mempedomani PERMENDAGRI 81	0	2	4	Rendah	Perlu diadakannya kegiatan Sosialisasi dan pembinaan sebelum diadakannya Lomba Desa dan Kelurahan	Bidang Pemdes
		Kegiatan Pemberdayaan Nilai Nilai Kegotongroyongan, Adat daerah dan Masyarakat Hukum Adat	Kurangnya Partisipasi Masyarakat terhadap nilai - nilai gotong royong	Kurangnya sosialisasi / pembinaan terhadap manfaat gotong royong	C	Masyarakat cenderung enggan untuk bergotong royong		0	2	4	Rendah	Pelaksanaan Penilaian Kegiatan Gotong Royong lebih ditingkatkan terutama dalam pemberian hadiah untuk peserta lomba agar juara sampai ada harapan I,II,III tingkat Provinsi Jambi	Bidang Pemdes
		Pelatihan Aparatur	Peserta yang hadir tidak sesuai	Kurangnya Kesadaran Tentang	C	Peserta yang		2	2	4	Sedang	waktu yang diberikan untuk	Bidang Pemdes

		Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	dengan undangan (Kades/Sekdes)	manfaat Pelatihan		hadir cenderung tidak serius dalam mengikuti Pelatihan dimaksud						narasumber lebih diperpanjang dan media praktek peserta lebih di perbanyak mengingat peserta lebih memahami apabila materi dilanjutkan dengan praktek.	
3	Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG	Jumlah Posyantek dan Wartek yang belum ideal	Kurangnya Pemahaman dari Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa dari Fungsi dan Manfaat keberadaan Posyantek dan Wartek	U	Peningkatan Produksi dan Pendapatan Masyarakat Tidak Meningkat	Dilakukan Pembinaan Terhadap Kecamatan dan Desa Yang Belum Memiliki Posyantek dan Wartek Dalam Bentuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi untuk dapat membentuk Posyantek dan Wartek diwilayahnya	5	2	10	Rendah		Bidang PMD
			Kurang berkembangnya penciptaan dan pemanfaatan alat TTG	Rendahnya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga setempat (Posyantek dan Wartek)	C		dilakukan Pembinaan Terhadap Kecamatan dan Desa Yang Sudah Memiliki Posyantek dan Wartek Dalam Bentuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dengan meyertakan lembaga-lembaga pendukung dalam pengembangan dan penciptaan alat TTG	4	2	8	Rendah		Bidang PMD
		Penguatan Pendampingan di Pedesaan	Menurunnya kualitas Tenaga Pendamping Profesional	Kurang di terima dan di dengarnya masukan dari pendamping desa oleh Pemerintah Desa dalam perencanaan di Desa	C	pembangunan di desa tidak berjalan sesuai dengan yang amanatkan undang-undang	dilaksanakan Rapat Koordinasi Tenaga Pendamping Profesional dengan mengundang dan melibatkan Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Kecamatan dan Desa	4	3	12	Sedang		Bidang PMD
				Kecil nya biaya operasional yang di terima oleh tenaga pendamping (khususnya PLD)	C		di usulkan kepada Pemerintah Pusat agar dapat menambah besaran anggaran operasional untuk tenga pendamping profesional di Provinsi Jambi						
		Penguatan Kapasitas Pengelolaan Bumdes	Tidak Berkembangnya BUMDesa di Provinsi Jambi	Rendahnya kemampuan dari pengurus BUMDesa	C	Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Rumah Tangga masyarakat	dilakukan kegiatan pembinaan dalam bentuk Bimbingan Teknis	4	2	8	Rendah		Bidang PMD

					kurangnya pemahaman dan dukungan dari Pemerintah Desa		tidak meningkat	meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha BUMDesa dalam bentuk Rapat Koordinasi						
		Pelatihan perempuan di perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	lambatnya pengentasan kemiskinan di Desa	rendahnya pendapatan rumah tangga di pedesaan	U	Lambatnya Pengentasan Kemiskinan Di Desa	dilakukan kegiatan pembinaan dalam bentuk pelatihan di pedesaan	4	2	8	Rendah		Bidang PMD	
				tidak tersalurkan bakat dan kemampuan dari perempuan di perdesaan										
		Pembinaan dan Revitalisasi Pokjanel Posyandu	menurunnya kualitas peranan dan pelayanan dari Pokjanel Posyandu dan Posyandu di Provinsi Jambi	tugas fungsi dari pokjanel posyandu tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan amanat undang-undang	C	rendahnya kualitas kesehatan masyarakat di pedesaan	di lakukan peningkatan koordinasi dengan pokjanel-pokjanel posyandu kab/kota se-Provinsi Jambi dalam bentuk Rapat Koordinasi	3	2	6	Rendah		Bidang PMD	
				kurang efektifnya keberadaan posyandu di pedesaan karena minimnya sarpras dan fasilitas pendukung serta pengetahuan kader dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan			diadakan pembinaan terhadap posyandu dalam bentuk kegiatan dan monitoring dan evaluasi							
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembinaan Kampung KB	belum didukung dengan sarana transportasi	belum adanya kendaraan dinas (mobil) di bidang Dalduk dan harus meminjam di bidang lain.	C	Mengganggu / menghambat kelancaran proses kegiatan	Mengajukan nota dinas kendaraan kepada atasan, dan meminjam kendaraan dinas ke bidang lain.	5	4	20	Tinggi	mobil harus ada pada saat dibutuhkan	Kabid Dalduk	
			kesulitan dalam mengumpulkan data dari Kabupaten (Data Kependudukan, Jumlah WUS, PUS, Peserta KB)	Data dari kabupaten / kota belum diterima lengkap karena pihak kab/ kota mengirimkan data ke BKKBN bukan ke bidang Dalduk	U	Analisis masalah di Kampung KB terhambat	Mengambil Data BKKBN	4	4	16	Tinggi	data harus bisa didapatkan dari Kab /Kota		
				PLKB sebagai ujung tombak dalam pengumpulan data melaporkan data yang ada ke BKKBN bukan ke DP3AP2	C	tidak terpenuhinya data-data yang	Memberitahukan di setiap kesempatan kepada Kab/ Kota bahwa DP3AP2 merupakan induk dari instansi mereka.					PLKB melaporkan data ke dinas Kab/Kota dan Dinas Kab/Kota melaporkan data ke DP3AP2		
				Dana PLKB berasal dari BKKBN	U	PLKB merasa bahwa dia bertanggung jawab hanya ke BKKBN bukan DP3AP2	Memberitahukan di setiap kesempatan kepada Kab/ Kota bahwa DP3AP2 merupakan induk dari instansi mereka.					PLKB melaporkan data ke dinas Kab/Kota dan Dinas Kab/Kota melaporkan data ke DP3AP2		
			cakupan peserta pembinaan sedikit	Sedikitnya anggaran	C	Informasi dan tujuan kegiatan tidak optimal	Mengendalikan / mengurangi jumlah / cakupan peserta sosialisasi.	4	3	12	Sedang	anggaran yang cukup		
		Pemutakhiran Data Kependudukan	Data yang diminta tidak lengkap diterima dari Kab/Kota	data dari kabupaten / kota belum diterima lengkap (susahnya mendapat data)	U	Analisis masalah terhambat	Mengambil data terpublikasi dari BKKBN, BPS, Bappenas dan lainnya.	4	4	16	Tinggi	Data harus bisa didapatkan dari Kab/Kota	Kabid Dalduk	
							Memberitahukan/ meminta data di setiap kesempatan bertemu pihak Kab/Kota					Data harus bisa didapatkan dari Kab/Kota		
		Sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja	belum didukung dengan sarana transportasi	belum adanya kendaraan dinas (mobil) di bidang Dalduk dan harus meminjam di bidang lain.	C	Mengganggu / menghambat kelancaran proses kegiatan	mengajukan nota dinas kendaraan kepada atasan.	5	4	20	Tinggi	mobil harus ada pada saat dibutuhkan	Kabid Dalduk	
							meminjam kendaraan dinas ke bidang lain.							

			Cakupan peserta sosialisasi sedikit (25 orang) dari tiap Kab/Kota	anggaran terbatas	C	Informasi dan tujuan kegiatan tidak	Mengendalikan / mengurangi jumlah cakupan peserta sosialisasi	4	3	12	Sedang	Peserta yang diundang dapat mencukupi sehingga tujuan tercapai optimal.
			Data yang diminta tidak lengkap diterima dari Kab/Kota (Data Pernikahan Remaja, PIK R)	Sulit mendapatkan data dari dinas kesehatan kab/ kota maupun provinsi dan tidak semua kab/kota mengembalikan matriks yang telah diberikan	C	tidak terpenuhinya data-data yang diperlukan, terhambatnya analisis masalah, dan kinerja	Mengambil data terpublish dan mencari data ke Dinas Provinsi yang ada	4	4	16	Tinggi	Data harus bisa didapatkan dari Kab/Kota maupun Provinsi

- 2
: Nama Program (Program yang ada pada RPJMD)
- 3
: Nama Kegiatan yang terkait Program
- 4
: Resiko yang dapat menghambat tercapainya kegiatan
- 5
: Penyebab terjadinya resiko
- 6
: UC = Resiko diluar kendali, C : Resiko yang masih dapat dikendalikan
- 7
: Dampak yang diakibatkan oleh resiko
- 8
: Pengendalian yang telah ada untuk menangani resiko
- 9
: K = Nilai Kemungkinan/Probabilitas (sesuai dengan nilai yang ada pada analisis resiko)
- 10
: D = Dampak (sesuai dengan nilai yang ada pada analisis resiko)
- 11
: Skor = K x D,
- 12
: Kategori = merupakan kategori resiko sesuai dengan kolom analisis resiko
- 13
: Rencana Pengendalian yang akan dilakukan
- 14
: Pemilik Resiko/Penanggung Jawab (Bidang yang menangani)

an. KEPALA DINAS,
SEKRETARIS

Drs. Rd. Abdurrajjid
Pembina Tk. I
NIP.19690226 199403 1 002